



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12160-12170

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Problematika Implementasi SAP Akruar pada Keuangan Desa Medan Estate

Christian Rafael Siregar, Afdhal Hidayat, Brilliant Kosu Raja Mora Sihombing, Putri Kemala Dewi Lubis, Khairani Alawiyah Matondang

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Indonesia

christian.7253540010@mhs.unimed.ac.id, afdhalhdt.7251240024@mhs.unimed.ac.id,

briliant.7253240037@mhs.unimed.ac.id, putrikemala@unimed.ac.id, alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi berbagai problematika yang memengaruhi kualitas pelaksanaannya di Desa Medan Estate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual pada pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi dan format pelaporan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Aparatur desa telah mampu menyusun laporan keuangan secara periodik, tetapi pemahaman konseptual mengenai pengakuan transaksi, klasifikasi akun, dan pemanfaatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan belum merata. Problematika utama dalam implementasi SAP berbasis akrual meliputi keterbatasan kompetensi aparatur, pelatihan yang belum berkelanjutan, ketergantungan pada aplikasi dan pendamping eksternal, serta adanya kesenjangan antara tuntutan standar dengan kapasitas operasional di lapangan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi SAP berbasis akrual perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, perbaikan sistem pendampingan teknis, serta penguatan pemanfaatan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: SAP Berbasis Akruar, Keuangan Desa, Implementasi, Akuntabilitas.

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sektor publik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik, pertanggungjawaban kinerja, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandai pergeseran penting dari logika pelaporan yang semata-mata administratif menuju penyajian informasi keuangan yang lebih komprehensif [1]. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual berhubungan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena mampu memperjelas posisi keuangan, kewajiban, dan beban secara lebih representatif [2], [4].

Perubahan tersebut tidak hanya mengubah format laporan, tetapi juga mengubah cara aparatur memaknai transaksi, bukti, dan tanggung jawab keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual menuntut ketelitian dalam pengakuan akun, klasifikasi aset dan kewajiban, penelusuran dokumen sumber, serta kemampuan menghubungkan informasi akuntansi dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Penelitian tentang kualitas laporan keuangan dan kualitas penyajiannya menunjukkan bahwa manfaat basis akrual baru akan terasa ketika standar dipahami secara substantif, bukan sekadar diikuti sebagai kewajiban formil [5], [6], [7], [8], [9].

Tantangan implementasi tersebut menjadi semakin kompleks pada level desa. Pengelolaan keuangan desa tidak berhenti pada penyusunan APBDes, tetapi mencakup pelaksanaan kegiatan, penatausahaan transaksi, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan desa dipengaruhi langsung oleh kompetensi aparatur, pembagian peran kerja, ketersediaan sistem

informasi, serta keteraturan dokumen pendukung [3], [5], [6]. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual di desa menuntut kapasitas yang tidak kecil meskipun unit organisasinya relatif terbatas.

Di sisi lain, pengawasan publik dan pemeriksaan eksternal terus menuntut perbaikan akuntabilitas. Ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan bahwa kualitas pengendalian intern, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan atas pengelolaan keuangan tetap menjadi agenda penting dalam sistem keuangan pemerintah [10]. Pada level desa, tuntutan tersebut sering kali berhadapan dengan keterbatasan praktis seperti perangkapan tugas, pergantian aparatur, ketersediaan sarana komputer, dan akses pendampingan teknis. Penelitian mengenai determinan implementasi SAP juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan dukungan teknologi merupakan variabel yang sangat menentukan keberhasilan reformasi akuntansi sektor publik [11], [12].

Kajian mutakhir tentang kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual memberi kontribusi positif terhadap mutu informasi keuangan, tetapi pengaruh itu sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas data, dan kemampuan aparatur mengolah bukti transaksi menjadi laporan yang dapat diverifikasi [12]. Temuan serupa terlihat pada studi yang menilai implementasi akrual dari sisi reviu laporan dan penyajian informasi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari tersusunnya laporan, melainkan dari sejauh mana laporan tersebut akurat, tertelusur, dan berguna bagi pengendalian [8], [9].

Perspektif behavioral accounting memperkaya pembacaan atas persoalan tersebut. Pengelolaan dana desa pada praktiknya dibentuk oleh kebiasaan kerja, persepsi risiko, komunikasi antarperangkat, dan ketergantungan pada aktor kunci yang memahami aplikasi maupun prosedur. Dengan kata lain, aturan formal tidak otomatis menjadi praktik kerja sehari-hari apabila tidak ditopang pembelajaran organisasi dan rutinitas yang stabil [14]. Pendekatan ini penting karena banyak hambatan implementasi SAP di tingkat desa justru muncul dari aspek perilaku organisasi, bukan semata-mata dari ketiadaan regulasi.

Sejumlah penelitian terbaru tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga menunjukkan bahwa ketersediaan informasi dan penggunaan aplikasi belum selalu berujung pada transparansi substantif. Publikasi ringkas, papan informasi, maupun laporan yang tersusun rapi masih sering berhenti pada pemenuhan administrasi, sementara pemanfaatan informasi keuangan untuk pengawasan sosial dan evaluasi internal belum merata [13], [15], [16], [17]. Artinya, terdapat jarak antara tersedianya dokumen dengan benar-benarnya pemakaian atas informasi yang terkandung di dalam dokumen tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Desa Medan Estate menjadi lokasi yang relevan untuk ditelaah karena berada pada kawasan administrasi yang dinamis dan telah menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan nasional. Desa ini telah menyusun dokumen dan laporan keuangan desa secara periodik, namun proses di balik penyusunan laporan, pembagian kerja antaraparatur, penggunaan aplikasi, dan penyesuaian terhadap standar akrual masih memerlukan pembacaan yang lebih mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pengaruh variabel tertentu secara kuantitatif atau mengevaluasi transparansi pada level hasil, sehingga masih terbuka ruang untuk melihat bagaimana standar akrual benar-benar dioperasikan dalam rutinitas kerja desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi SAP berbasis akrual dijalankan dalam pengelolaan keuangan Desa Medan Estate. Kedua, problematika apa saja yang memengaruhi implementasi tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap transparansi serta akuntabilitas. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian gambaran empiris mengenai relasi antara regulasi, kapasitas aparatur, sistem informasi, dan praktik kerja administratif dalam implementasi SAP akrual pada level desa.

Dengan landasan konseptual dan telaah penelitian terdahulu tersebut, studi ini memosisikan implementasi SAP akrual di desa sebagai persoalan yang bersifat teknis sekaligus organisasional. Fokus penelitian bukan hanya menilai apakah dokumen tersusun, tetapi juga bagaimana proses penyusunan itu berlangsung, siapa yang menguasai pengetahuan teknis, di mana titik rawan kesalahan muncul, dan sejauh mana informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperkuat akuntabilitas desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan empat unsur sekaligus, yaitu standar akuntansi, rutinitas kerja aparatur, penggunaan sistem informasi, dan keluaran tata kelola desa. Dengan demikian, penelitian

ini tidak berhenti pada deskripsi masalah, tetapi juga menawarkan pembacaan yang lebih rinci mengenai relasi antara ketentuan normatif dan praktik administratif di tingkat pemerintahan desa.

Literatur yang secara khusus menelaah desa menunjukkan pola yang serupa. Studi mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa publikasi informasi dan pemenuhan dokumen belum otomatis menghasilkan transparansi yang bermakna apabila masyarakat tidak mudah mengakses, memahami, dan menggunakan informasi itu [13]. Demikian pula, kajian tentang akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, dan pemanfaatan aplikasi menunjukkan bahwa digitalisasi dan standarisasi format merupakan prasyarat penting, tetapi hasilnya akan tetap terbatas jika tidak ditopang proses pendampingan, disiplin dokumentasi, dan kapasitas aparatur yang memadai [15], [16], [17].

Penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi SAP berbasis akrual banyak menempatkan faktor sumber daya manusia, sistem informasi, dan kualitas pengendalian sebagai determinan utama. Temuan tersebut konsisten baik pada level pemerintah daerah maupun entitas publik lain, yakni bahwa penerapan basis akrual akan lebih efektif ketika aparatur memahami logika standar, organisasi memiliki mekanisme kerja yang jelas, dan data didukung dokumentasi yang rapi [6], [11], [12]. Kendala yang muncul umumnya bukan pada absennya regulasi, melainkan pada kesenjangan antara kompleksitas standar dengan kapasitas pelaksana di lapangan.

1.2. Penelitian Terdahulu dan Celah Studi

Dalam konteks desa, transparansi dan akuntabilitas juga perlu dibaca sebagai proses sosial. Laporan yang lengkap akan bernilai rendah apabila tidak dapat diuji, dipahami, atau dipakai sebagai dasar evaluasi atas pengelolaan anggaran. Karena itu, implementasi SAP akrual di desa seharusnya tidak berhenti pada ketepatan teknis, melainkan juga harus memperkuat hubungan antara bukti transaksi, laporan, dan penjelasan kepada publik. Perspektif ini membuat kualitas implementasi perlu dinilai dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi administratif dan sisi penggunaan informasi.

Pengelolaan keuangan desa sendiri berlangsung dalam satu siklus yang saling berhubungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap membutuhkan bukti, otorisasi, dan pencatatan yang konsisten. Kelemahan pada satu tahap akan langsung memengaruhi tahap berikutnya. Karena itu, keberhasilan SAP berbasis akrual di desa tidak cukup diukur dari kualitas laporan akhir, tetapi juga dari bagaimana alur kerja dan kelengkapan dokumen dibangun sejak awal proses pengelolaan keuangan berlangsung [3], [4], [5].

Secara konseptual, SAP berbasis akrual bertujuan membuat informasi keuangan pemerintah lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Pada level desa, implikasi konsep tersebut terlihat dalam kebutuhan untuk menghubungkan penggunaan anggaran dengan posisi keuangan, kewajiban, dan bukti pertanggungjawaban secara lebih tertib. Artinya, basis akrual bukan semata aturan pencatatan, tetapi kerangka untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki jejak administratif yang jelas dan dapat dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan [1], [2], [7], [8], [9].

2. Metode Penelitian

2.1. Rancangan dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi studi kasus pada Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung besarnya pengaruh variabel, melainkan memahami bagaimana implementasi SAP berbasis akrual dijalankan dalam situasi kerja yang nyata, siapa saja aktor yang berperan, serta bagaimana aparatur menafsirkan aturan dalam praktik administrasi sehari-hari.

Lokasi penelitian dipilih atas dasar relevansi substantif dan keterjangkauan data. Desa Medan Estate telah menjalankan tata kelola keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku dan secara administratif menghasilkan dokumen pelaporan yang diperlukan. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti menelusuri praktik implementasi dari tahap perencanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada tahun 2026 dan difokuskan pada siklus kerja keuangan desa yang sedang berjalan serta dokumen pertanggungjawaban periode sebelumnya.

2.2. Informan dan Sumber Data

Informan dipilih secara purposive, yaitu aparatur yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan, penginputan, pemeriksaan, dan penandatanganan dokumen keuangan desa. Informan mencakup kepala desa, sekretaris desa, bendahara atau kaur keuangan, operator aplikasi, serta perangkat yang berkaitan dengan administrasi kegiatan. Pemilihan informan yang beragam dimaksudkan agar penelitian tidak hanya menangkap pandangan pejabat pengambil keputusan, tetapi juga pengalaman teknis aparatur yang berhadapan langsung dengan bukti transaksi dan aplikasi pelaporan.

Tabel 1. Sumber Data dan Fokus Penggalan

Sumber data	Fokus informasi	Kontribusi terhadap analisis
Wawancara aparatur desa	Pemahaman SAP akrual, pembagian kerja, kendala operasional, dan bentuk penyesuaian lapangan	Menjelaskan bagaimana standar dipraktikkan dan ditafsirkan
Observasi proses administrasi	Alur pengumpulan bukti, pencatatan, pemeriksaan, dan penggunaan aplikasi	Menunjukkan kesesuaian antara pernyataan dan praktik kerja
Dokumentasi desa	APBDes, buku kas, laporan realisasi, dan arsip pertanggungjawaban	Menjadi dasar verifikasi atas konsistensi administrasi dan pelaporan

Sebagaimana diringkas pada Tabel 1, penelitian memadukan data primer dan data sekunder agar gambaran implementasi tidak hanya bertumpu pada persepsi informan. Dokumen desa digunakan untuk memeriksa konsistensi penjelasan informan mengenai alur penatausahaan, kelengkapan bukti, dan penyusunan laporan. Dengan strategi ini, temuan yang dihasilkan lebih mampu menggambarkan kondisi kerja administratif secara utuh.

2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Keabsahan

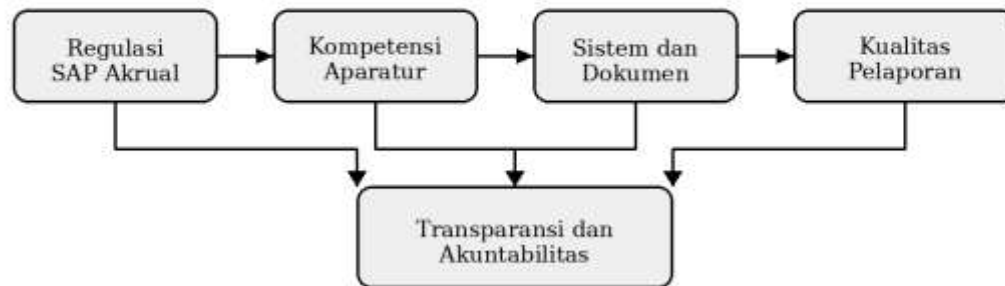
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali proses implementasi SAP berbasis akrual, bentuk kendala yang dihadapi, pola koordinasi antaraparatur, serta cara aparatur memahami istilah dan prosedur akuntansi. Observasi dilakukan pada aktivitas yang berkaitan dengan penatausahaan dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban. Dokumentasi dipakai untuk memeriksa bentuk laporan, buku administrasi, bukti pengeluaran, serta arsip regulasi internal yang digunakan desa.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Informasi yang diperoleh dari satu informan dibandingkan dengan penjelasan informan lain, lalu diperiksa lagi melalui dokumen dan hasil observasi. Data yang dianggap belum konsisten ditelusuri ulang dengan pertanyaan lanjutan atau verifikasi terhadap arsip. Dalam penyajian hasil, peneliti tidak menampilkan kutipan langsung informan, melainkan merumuskan temuan dalam bentuk narasi akademik agar fokus pembahasan tetap berada pada substansi praktik implementasi.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap yang berlangsung berulang, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data lapangan dikelompokkan ke dalam tema implementasi administratif, kompetensi aparatur, sistem informasi, kesenjangan regulasi, dan implikasi transparansi. Pada tahap penyajian, data disusun menjadi narasi tematik serta matriks temuan agar hubungan antargejala dapat dibaca dengan lebih jelas. Kesimpulan kemudian ditarik setelah pola antar-data menunjukkan kecenderungan yang konsisten.

Alur Analisis Implementasi SAP Akrual



Gambar 1. Alur Fokus Analisis Implementasi SAP Akrual

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian membaca implementasi SAP akrual sebagai proses yang dipengaruhi secara simultan oleh regulasi, kompetensi aparatur, kualitas sistem dan dokumen, serta bentuk pemanfaatan informasi dalam tata kelola desa. Kerangka ini membantu peneliti memeriksa apakah laporan yang tersusun rapi benar-benar dihasilkan dari proses yang sudah substantif, atau justru masih sangat bergantung pada kepatuhan administratif dan bantuan teknis eksternal.

Pendekatan tersebut penting karena penelitian ini berusaha menjaga keseimbangan antara pembacaan dokumen dan pembacaan praktik. Dokumen diperlakukan sebagai jejak formal implementasi, sedangkan wawancara dan observasi dipakai untuk menjelaskan bagaimana dokumen tersebut dihasilkan. Dengan strategi ini, hasil penelitian tidak terjebak pada penilaian tekstual atas laporan, tetapi mampu menunjukkan dinamika organisasi kerja yang berada di belakang laporan tersebut.

Dalam proses analisis, peneliti juga menerapkan prinsip anonimisasi terhadap identitas personal informan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tetap berfokus pada pola implementasi dan problematika kelembagaan, bukan pada personalisasi kesalahan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif yang ingin membaca makna, proses, dan konteks, sehingga hasil yang ditampilkan berupa narasi tematik tanpa kutipan langsung informan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kondisi Implementasi SAP Berbasis Akrual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Medan Estate telah menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada regulasi yang mewajibkan penggunaan format dan mekanisme pelaporan tertentu. Aparatur desa telah mengenal alur penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan transaksi, pengumpulan bukti, dan penyusunan laporan realisasi maupun pertanggungjawaban. Secara formal, kondisi tersebut menandakan bahwa kerangka implementasi SAP berbasis akrual sudah hadir dalam rutinitas kerja desa karena pencatatan dan pelaporan tidak lagi berjalan sepenuhnya secara ad hoc.

Meskipun demikian, implementasi yang tampak di permukaan belum selalu mencerminkan pemahaman konseptual yang kuat. Dalam praktik sehari-hari, SAP berbasis akrual lebih banyak dipahami sebagai seperangkat kewajiban administratif yang harus dipenuhi agar laporan selesai tepat waktu dan dapat diterima pada proses pemeriksaan berjenjang. Aparatur cenderung memulai pekerjaan dari kebutuhan menyesuaikan dokumen dengan format yang tersedia, bukan dari upaya membaca substansi pengakuan transaksi secara menyeluruh. Situasi ini membuat kepatuhan formal relatif terjaga, tetapi kedalaman makna akrual belum merata pada seluruh pelaksana.

Pada tahap operasional, pengakuan transaksi masih sangat dipengaruhi oleh kelengkapan bukti dan pola kerja yang telah dibiasakan. Ketika transaksi sesuai dengan kategori yang umum dan menu aplikasi tersedia, proses pencatatan dapat berlangsung lancar. Namun ketika muncul kebutuhan klasifikasi yang tidak rutin, aparatur

cenderung menunggu arahan dari pihak yang lebih paham atau kembali melihat dokumen contoh sebelumnya. Pola ini memperlihatkan bahwa pelaporan telah dihasilkan, tetapi belum sepenuhnya ditopang kemampuan analitis yang memungkinkan aparatur menafsirkan transaksi secara mandiri.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa manfaat SAP akrual terhadap kualitas laporan baru tercapai ketika pemahaman konseptual berjalan beriringan dengan ketertiban administrasi [2], [4], [7]-[9]. Dengan kata lain, Medan Estate telah bergerak ke arah yang benar dari sisi kepatuhan, tetapi transformasi menuju implementasi substantif masih berada pada tahap berkembang. Titik kritisnya terletak pada relasi antara standar formal, kapasitas individu, dan dukungan sistem kerja.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Implementasi dan Problematika

Aspek	Temuan lapangan	Implikasi
Pencatatan transaksi	Transaksi dicatat mengikuti format dan menu aplikasi yang tersedia	Kepatuhan administratif tercapai, tetapi fleksibilitas analitis masih terbatas
Kompetensi aparatur	Tidak semua pelaksana memiliki latar belakang akuntansi dan pemahaman akrual yang merata	Terjadi ketergantungan pada aparatur tertentu dan bantuan eksternal
Pelatihan dan pendampingan	Pelatihan bersifat episodik dan lebih teknis-operasional	Pengetahuan prosedural tumbuh lebih cepat daripada pemahaman konseptual
Sistem informasi	Aplikasi membantu kerapian pelaporan, namun masih bergantung pada kelengkapan dokumen dan kestabilan sarana	Risiko keterlambatan dan kesalahan input tetap ada
Transparansi dan akuntabilitas	Dokumen lebih tertib dan mudah ditelusuri, tetapi pemanfaatan informasi bagi evaluasi publik masih terbatas	Akuntabilitas prosedural meningkat, akuntabilitas substantif belum optimal

Tabel 2 memperlihatkan bahwa problematika implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Keterbatasan pemahaman aparatur membuat penggunaan aplikasi lebih berorientasi pada penyelesaian laporan, sementara keterbatasan pendampingan membuat aparatur sulit mengembangkan kemampuan interpretatif terhadap informasi akrual. Karena itu, kualitas implementasi tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya laporan, tetapi dari proses yang melahirkan laporan tersebut.

3.2. Kompetensi Aparatur dan Proses Pembelajaran

Problematika pertama yang paling menonjol ialah kompetensi aparatur. Struktur kerja keuangan desa menuntut aparatur memahami istilah akuntansi, alur dokumen, mekanisme verifikasi, dan penggunaan aplikasi secara serempak. Dalam kenyataannya, kemampuan tersebut tersebar tidak merata. Sebagian aparatur memahami tahapan administratif, tetapi belum mantap ketika harus menjelaskan dasar pengakuan transaksi atau menghubungkan satu dokumen dengan konsekuensi pelaporannya. Ketimpangan kemampuan ini membuat proses kerja sering berpusat pada satu atau dua aktor yang dianggap paling menguasai teknis pencatatan.

Pola pembelajaran aparatur lebih banyak berlangsung melalui pengalaman kerja, mencontoh dokumen periode sebelumnya, dan penyesuaian terhadap catatan koreksi dari pendamping atau pemeriksa. Mekanisme belajar seperti ini memang membantu penyelesaian tugas jangka pendek, tetapi cenderung melahirkan pemahaman yang parsial. Aparatur mengetahui apa yang harus diisi, namun tidak selalu memahami mengapa suatu transaksi harus diletakkan pada akun tertentu atau bagaimana implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Pelatihan yang diterima aparatur juga masih bersifat episodik. Materi pelatihan lebih sering menekankan langkah-langkah teknis penginputan, perubahan regulasi administratif, dan penyesuaian format terbaru, sementara aspek konseptual SAP akrual tidak selalu dibahas secara mendalam. Akibatnya, aparatur relatif cepat beradaptasi terhadap perubahan formulir, tetapi lebih lambat ketika menghadapi situasi yang menuntut penalaran akuntansi di luar pola rutin. Temuan ini mendukung penelitian yang menempatkan kualitas sumber daya manusia dan komitmen implementasi sebagai faktor penentu dalam keberhasilan penerapan SAP akrual [5], [6], [11], [12].

Dari sisi organisasi kerja, keterbatasan kompetensi juga menciptakan kerentanan kelembagaan. Ketika aktor yang paling memahami proses administrasi berhalangan atau berganti peran, risiko keterlambatan dan inkonsistensi pencatatan meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan pada level individu tertentu, melainkan harus dibangun sebagai pengetahuan kelembagaan yang tersebar dan

terdokumentasi. Dengan demikian, kontinuitas implementasi tidak sepenuhnya bergantung pada memori personal aparatur.

3.3. Sistem Informasi, Dokumen, dan Kesenjangan Regulasi

Problematika kedua berkaitan dengan peran sistem informasi dan kualitas dokumen pendukung. Kehadiran aplikasi pengelolaan keuangan desa membantu standarisasi format dan mempercepat penyusunan laporan. Aparatur memiliki acuan yang lebih jelas mengenai menu input, struktur data, dan keluaran dokumen. Dalam konteks ini, sistem informasi berfungsi sebagai alat penata kerja yang memudahkan konsolidasi data dan memperbaiki keteraturan arsip [3]. Namun fungsi tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan implementasi ketika data sumber, bukti transaksi, atau koordinasi antarpelaksana belum rapi sejak awal.

Di lapangan, aplikasi lebih banyak berperan sebagai instrumen pengolahan administratif daripada instrumen pembelajaran akrual. Aparatur dapat mengikuti tahapan penginputan selama transaksi sesuai dengan kategori yang telah lazim digunakan, tetapi masih memerlukan bantuan ketika menghadapi kasus yang menuntut penyesuaian klasifikasi. Selain itu, kestabilan sarana, kecukupan perangkat, dan ketersediaan waktu untuk merekonsiliasi dokumen manual dengan hasil aplikasi tetap menjadi faktor penting. Kelemahan pada satu titik saja dapat memicu keterlambatan, pengulangan input, atau koreksi berulang.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik juga tampak ketika standar akrual yang normatif bertemu dengan logika kerja desa yang masih kuat dipengaruhi kebutuhan administratif jangka pendek. Secara regulatif, SAP menuntut pencatatan yang lengkap dan logis. Akan tetapi, pada praktiknya, penyelesaian laporan sering lebih didorong oleh tenggat pertanggungjawaban dan tuntutan kelengkapan berkas. Akibatnya, pendekatan kas dan pendekatan akrual kadang bercampur dalam cara aparatur menafsirkan transaksi. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi standar belum selalu berlangsung dalam bentuk internalisasi prinsip, melainkan dalam bentuk penyesuaian pragmatis terhadap tuntutan kerja.

Temuan ini sejalan dengan studi terbaru yang menilai penggunaan Siskeudes dan kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagai faktor pendorong transparansi, namun sekaligus menegaskan bahwa aplikasi tidak dapat menggantikan kualitas SDM dan pengawasan proses [16], [17]. Dengan kata lain, teknologi memperkuat keteraturan, tetapi keberhasilan implementasi tetap bergantung pada manusia, dokumen sumber, dan disiplin kerja yang menopangnya. Karena itu, pembenahan sistem informasi harus berjalan seiring dengan penguatan prosedur verifikasi dan pembelajaran aparatur.

3.4. Transparansi, Akuntabilitas, dan Pemanfaatan Informasi

Walaupun berbagai kendala masih ditemukan, implementasi SAP berbasis akrual di Desa Medan Estate tetap menghasilkan dampak positif. Dampak yang paling nyata ialah meningkatnya keteraturan pencatatan, kejelasan urutan dokumen, dan kemudahan penelusuran jejak transaksi. Dengan adanya format yang lebih baku, aparatur memiliki standar yang lebih jelas dalam menyiapkan bukti, mencocokkan data, dan menyusun laporan periodik. Perbaikan ini penting karena menjadi fondasi bagi akuntabilitas prosedural dan memudahkan proses pemeriksaan berjenjang.

Dari sisi transparansi, perbaikan administrasi membuat informasi keuangan lebih siap untuk ditunjukkan ketika dibutuhkan. Akan tetapi, transparansi yang terbentuk masih cenderung berorientasi dokumen, yaitu berfokus pada tersedianya laporan dan bukti, belum sepenuhnya pada kemampuan menjelaskan makna angka kepada publik maupun antarpelaksana. Studi terbaru mengenai transparansi desa menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari aksesibilitas, keterpahaman, dan ruang partisipasi masyarakat terhadap informasi tersebut [13], [15]. Dalam konteks Medan Estate, dimensi pertama relatif membaik, sedangkan dua dimensi berikutnya masih perlu diperkuat.

Akuntabilitas juga mengalami penguatan, tetapi terutama pada sisi prosedural. Aparatur menjadi lebih disiplin dalam mengumpulkan bukti dan menyesuaikan laporan dengan format yang ditetapkan. Namun akuntabilitas substantif, yaitu kemampuan menggunakan informasi keuangan untuk menjelaskan capaian, selisih realisasi, serta implikasi penggunaan anggaran terhadap pelayanan publik, masih berkembang. Temuan ini penting karena kualitas akuntabilitas publik tidak berhenti pada ada atau tidaknya laporan, melainkan pada kemampuan laporan tersebut untuk dipahami, diuji, dan digunakan sebagai dasar evaluasi [10], [11].

Perspektif behavioral accounting membantu menjelaskan mengapa dampak positif dapat muncul bersamaan dengan keterbatasan substantif. Standar akrual mendorong perubahan rutinitas, tetapi rutinitas itu baru menjadi budaya kerja ketika diikuti pembiasaan, pembelajaran bersama, dan insentif organisasi yang konsisten [14]. Jika perubahan hanya diletakkan pada level kewajiban administratif, maka peningkatan yang diperoleh cenderung berhenti pada kerapian laporan. Sebaliknya, jika perubahan diikuti refleksi atas penggunaan informasi, maka SAP akrual dapat berfungsi sebagai alat kendali dan pengambilan keputusan yang lebih bernilai.

3.5. Strategi Penguatan Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penguatan implementasi SAP akrual di Desa Medan Estate perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Pelatihan sebaiknya tidak hanya berupa sosialisasi perubahan aturan atau langkah penginputan, tetapi disusun berbasis masalah yang benar-benar dihadapi aparatur desa. Materi pelatihan yang menelusuri contoh transaksi nyata, kesalahan klasifikasi, hubungan antar-dokumen, serta konsekuensi akuntabilitas akan lebih efektif untuk menumbuhkan pemahaman substantif dibandingkan pelatihan yang semata-mata menekankan penyelesaian format.

Selain itu, desa membutuhkan mekanisme kerja yang mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Standard operating procedure sederhana, daftar periksa dokumen, pembagian peran yang jelas, serta arsip contoh kasus dapat membantu menjadikan pengetahuan teknis sebagai aset kelembagaan. Strategi ini penting agar pergantian aparatur tidak langsung menurunkan kualitas implementasi. Penguatan tersebut sejalan dengan temuan berbagai studi bahwa akuntabilitas dan transparansi desa meningkat ketika kapasitas organisasi, sistem informasi, dan praktik pendampingan tumbuh secara bersama-sama [15], [16], [17].

Pada saat yang sama, transparansi desa perlu diperluas dari sekadar penyediaan dokumen menuju penyajian informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat. Ringkasan realisasi, penjelasan program, dan uraian sederhana mengenai penggunaan anggaran dapat membuat informasi keuangan lebih mudah dipahami publik. Ketika laporan keuangan tidak hanya rapi secara administratif tetapi juga dapat dibaca secara sosial, maka implementasi SAP akrual akan lebih dekat dengan tujuan besarnya, yaitu memperkuat kepercayaan, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan desa.

Implikasi praktis dari temuan ini ialah perlunya perubahan cara menilai keberhasilan implementasi. Desa dan pembina di atasnya tidak seharusnya hanya memeriksa ketepatan waktu dan kelengkapan laporan, tetapi juga perlu menilai apakah pengetahuan teknis telah tersebar, apakah prosedur verifikasi dipahami lebih dari satu pelaksana, dan apakah informasi keuangan cukup jelas untuk dipakai menjelaskan capaian kegiatan. Ukuran keberhasilan yang lebih prosedural akan membantu desa membangun implementasi SAP akrual yang lebih tahan terhadap pergantian personel dan perubahan regulasi.

Bagi pengembangan tata kelola desa, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi SAP akrual sebaiknya diletakkan sebagai proses penguatan kelembagaan, bukan sekadar pemenuhan tuntutan administratif periodik. Ketika pengetahuan kerja, sistem informasi, dan mekanisme pendampingan tumbuh bersama, maka kualitas laporan akan meningkat sekaligus memperbaiki kemampuan desa menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dengan demikian, nilai strategis SAP akrual terletak pada kemampuannya menghubungkan tertib administrasi dengan pembelajaran organisasi dan kepercayaan publik.

3.6. Implikasi bagi Tata Kelola Desa

Karena itu, penguatan implementasi sebaiknya dilakukan melalui pengendalian bertahap. Pada tahap perencanaan, desa perlu memastikan klasifikasi belanja dan kelengkapan dokumen dasar sudah dipahami sejak awal. Pada tahap pelaksanaan, verifikasi bukti dan konsistensi pencatatan harus dipantau sebelum menumpuk di akhir periode. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, desa memerlukan ruang pembelajaran untuk menelaah kembali kesalahan klasifikasi, koreksi dari pembina, dan pola masalah yang berulang. Pendekatan bertahap ini akan lebih efektif dibandingkan pembenahan yang hanya dilakukan ketika laporan hendak diserahkan.

Analisis per tahap sebagaimana diringkas dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa titik rawan terbesar terletak pada penatausahaan dan pelaporan. Kedua tahap ini menuntut kemampuan menerjemahkan transaksi ke dalam kategori yang benar, memastikan keterhubungan antar-dokumen, serta menyelaraskan pencatatan manual dengan sistem digital. Jika kelemahan sudah muncul pada dua tahap tersebut, maka kualitas pertanggungjawaban akan ikut

terpengaruh. Karena itu, pendampingan teknis dan penguatan prosedur verifikasi sebaiknya dipusatkan pada area ini agar perbaikan implementasi lebih efektif [3], [15], [16], [17].

Untuk membaca implementasi secara lebih operasional, penelitian ini juga memetakan titik rawan pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Pemetaan ini penting karena persoalan implementasi SAP akrual tidak muncul secara seragam; ada masalah yang dominan pada tahap perencanaan, ada yang lebih terasa ketika penatausahaan berlangsung, dan ada pula yang baru tampak pada saat laporan dan pertanggungjawaban disusun. Dengan memecah proses ke dalam beberapa tahap, kebutuhan perbaikan dapat dirumuskan secara lebih spesifik dan realistis.

3.7. Titik Rawan pada Setiap Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa dan Titik Rawan Implementasi

Tahap	Titik rawan implementasi	Kebutuhan penguatan
Perencanaan	Pemahaman klasifikasi kegiatan dan kelengkapan dokumen dasar belum seragam	Penyamaan persepsi sejak awal dan daftar periksa dokumen
Pelaksanaan	Bukti transaksi dan koordinasi antar-pelaksana belum selalu tertib	Verifikasi berkala selama kegiatan berjalan
Penatausahaan	Risiko salah input, salah klasifikasi, dan ketergantungan pada operator tinggi	Pendampingan teknis, rekonsiliasi manual-digital, dan pembagian peran jelas
Pelaporan	Koreksi berulang muncul karena sinkronisasi data terlambat	Review internal sebelum laporan dikirim ke pembina
Pertanggungjawaban	Informasi keuangan belum selalu mudah dijelaskan kepada publik	Ringkasan laporan yang komunikatif dan mudah dipahami

Tabel tersebut menegaskan bahwa implementasi SAP akrual di desa perlu dibaca sebagai rangkaian proses yang terhubung. Ketika pengendalian hanya difokuskan pada tahap akhir, banyak kesalahan administratif justru terlambat diketahui dan kemudian dibebankan kepada proses pelaporan. Sebaliknya, apabila penguatan dilakukan sejak tahap awal, maka kualitas data, keteraturan dokumen, dan kejelasan pertanggungjawaban akan meningkat secara lebih konsisten.

Penelitian berikutnya dapat menindaklanjuti temuan ini melalui tiga arah. Pertama, studi komparatif antar-desa diperlukan untuk melihat apakah problematika yang ditemukan di Medan Estate bersifat khas atau justru mewakili pola yang lebih luas pada desa-desa dengan karakteristik serupa. Kedua, pendekatan longitudinal penting untuk menilai apakah pelatihan, pergantian aparatur, dan pembaruan aplikasi benar-benar menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan, bukan hanya perbaikan sesaat menjelang pertanggungjawaban. Ketiga, pendekatan campuran dapat digunakan untuk menghubungkan temuan kualitatif tentang proses kerja dengan pengukuran kuantitatif atas ketepatan waktu pelaporan, tingkat koreksi, atau tingkat keterpahaman informasi keuangan oleh masyarakat. Dengan arah tersebut, kajian implementasi SAP akrual di desa dapat berkembang dari sekadar evaluasi kepatuhan menuju evaluasi kapasitas tata kelola yang lebih menyeluruh.

Studi ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian difokuskan pada satu desa sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh desa, melainkan untuk menghadirkan pemahaman mendalam tentang proses implementasi pada konteks tertentu. Kedua, fokus penelitian berada pada praktik administratif dan persepsi aparatur desa, sehingga pembacaan terhadap pengalaman masyarakat sebagai pengguna informasi publik belum digali secara setara. Ketiga, penelitian tidak mengukur kinerja implementasi secara numerik, seperti rasio koreksi laporan atau tingkat ketepatan waktu pertanggungjawaban, karena penekanan utamanya memang pada dinamika proses. Walaupun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai temuan, justru menegaskan bahwa implementasi SAP akrual di desa perlu dipahami secara bertahap: mulai dari bagaimana aparatur bekerja, bagaimana sistem dan dokumen saling berhubungan, hingga bagaimana laporan akhirnya digunakan untuk akuntabilitas publik.

3.8. Keterbatasan Penelitian dan Arah Riset

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembinaan implementasi SAP akrual pada desa perlu bergeser dari pola koreksi akhir menjadi pola pendampingan proses. Pembina kecamatan, pendamping desa, dan pemerintah kabupaten dapat mengembangkan mekanisme review berkala yang lebih fokus pada kualitas bukti,

konsistensi klasifikasi, dan penyebaran pengetahuan teknis di internal desa. Pola seperti ini akan mengurangi kecenderungan desa bekerja di bawah tekanan tenggat akhir dan membantu aparatur memahami standar sebagai alat kendali, bukan sekadar daftar kewajiban. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari sedikitnya temuan pada laporan akhir, tetapi juga dari tumbuhnya kapasitas desa mengelola dokumen dan data secara lebih mandiri.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan desain penguatan kapasitas. Desa membutuhkan modul pelatihan yang berbasis kasus, bank contoh dokumen, forum belajar antardesa, serta mekanisme konsultasi cepat ketika muncul persoalan klasifikasi transaksi. Tanpa dukungan seperti itu, pengetahuan teknis akan tetap terpusat pada individu tertentu dan risiko kesalahan akan berulang dari tahun ke tahun. Karena itu, penguatan implementasi SAP akrual idealnya dipadukan dengan manajemen pengetahuan sederhana di tingkat desa, misalnya melalui arsip koreksi, daftar masalah yang sering muncul, dan catatan solusi yang dapat diakses aparatur baru. Strategi tersebut akan membuat perbaikan implementasi lebih berkelanjutan dan memperkuat hubungan antara tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah berjalan dalam kerangka regulasi yang benar dan telah menghasilkan perbaikan administratif yang nyata, terutama pada keteraturan pencatatan, kelengkapan dokumen, disiplin pelaporan, dan kemudahan penelusuran transaksi. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif karena pemahaman aparatur terhadap logika akrual, pengakuan transaksi, dan pemanfaatan informasi keuangan untuk evaluasi maupun pengambilan keputusan masih belum merata. Problematika yang paling dominan terletak pada keterbatasan kompetensi aparatur, pola pelatihan yang belum berkelanjutan, ketergantungan pada aktor tertentu dan aplikasi, serta kesenjangan antara tuntutan standar yang normatif dengan kapasitas operasional di lapangan. Kondisi tersebut membuat SAP akrual lebih sering berfungsi sebagai instrumen kepatuhan administratif daripada sebagai alat manajerial yang sepenuhnya dimanfaatkan. Meski demikian, temuan penelitian menegaskan bahwa arah perbaikannya sudah terlihat, sehingga penguatan kapasitas berbasis kasus, pelembagaan pengetahuan kerja, perbaikan prosedur verifikasi, dan perluasan transparansi yang lebih komunikatif menjadi langkah yang paling relevan untuk mendorong implementasi yang lebih matang. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan perbandingan antar-desa atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi SAP akrual pada pemerintahan desa.

Referensi

1. Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan." [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id>
2. D. Lestari and S. Rahayu, "Penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2020, doi: 10.31629/jiafi.v3i2.2222.
3. D. Nugroho and R. Santoso, "Pengaruh sistem informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntansi Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 55–70, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/2071>
4. S. A. Putra and R. J. Varina, "Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, vol. 1, no. 2, pp. 85–98, 2021, doi: 10.33701/jtpm.v1i2.2071.
5. A. Wahyudi and D. A. Hasri, "Pengaruh peran badan permusyawaratan desa dan kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa," *Jurnal Maneksi*, vol. 10, no. 1, Jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.31959/jm.v10i1.649>
6. A. De Grave and S. Hasan, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual," *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, vol. 15, no. 2, pp. 177–190, 2022. <https://journal.uinjkt.ac.id/akuntabilitas/article/view/25475/pdf>
7. Mardika, I., & Ismail, T. (2022). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*.
8. R. D. Putri, "Reviu laporan keuangan pemerintah berbasis akrual," *Jurnal Ilmiah Riset Keuangan*, vol. 4, no. 2, pp. 67–79, 2022. [Online]. Available: <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/2462>
9. L. Rosana and R. Bharata, "Implementasi SAP berbasis akrual terhadap kualitas penyajian laporan keuangan," *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 33–46, 2022. [Online]. Available: <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/366>
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)," 2023. [Online]. Available: <https://www.bpk.go.id>
11. Nurhasniwati, Mukhzarudfa, and E. Diah, "Determinan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual: Studi Pada Badan Penegelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, vol. 9, no. 1, pp. 15–27, 2024. [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/36453>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7654>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. R. Aditya, "Pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah," *Journal of Social and Economics Research*, vol. 6, no. 1, pp. 45–58, 2024. [Online]. Available: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/download/369/298>
13. S. Syamsul, N. Nurhadi, and N. Nurlailah, "Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Mengungkap Implementasinya di Desa Pombewe," *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, vol. 15, no. 1, pp. 34–43, 2025. doi: 10.37859/jae.v15i1.7835.
14. G. Apriyanto, S. A. Azis, and T. A. Putri, "Behavioral accounting and control in village fund management in Indonesia," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, vol. 15, no. 2, pp. 202–215, Apr. 2024, doi: 10.26740/jaj.v15n2.p.202-215.
15. M. Suliyatini, E. Dewata, and I. Satriawan, "Transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa," *Journal of Applied Accounting (JAA)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2025..
16. Firdaus and P. S. Prihatin, "Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas: Studi kasus di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar," *JMP Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, vol. 2, no. 4, Dec. 2025.
17. M. A. Jayadi and T. E. Sandari, "Tata kelola keuangan desa dan kompetensi aparatur: Implementasi SISKEUDES berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018," *Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting*, vol. 1, no. 3, pp. 356–365, Mar. 2026.